

Analisis Konseptual Penetapan Orde Perkotaan dalam Pembangunan Ekonomi Kota

Rusmiati^{1*}, Thamara Idil Fitri Marlina², Angga Pratama³, Feri Kurniawan⁴, Chika Dwi Oktaviani⁵

¹⁻⁵ Universitas Nurul Huda, Indonesia

Email: rusmiati1268@gmail.com^{1}, thamaraidilfitrimarlina@gmail.com²*

**Penulis Korespondensi: rusmiati1268@gmail.com¹*

Abstract: *Urban development is inextricably linked to the process of urbanization and its role as a center of economic activity. Each city has a different level and function, necessitating the classification of cities based on their urban order. Determining urban order is crucial for understanding a city's role within the urban system and serves as a basis for more targeted economic development planning. This article aims to analyze the concept of determining urban order and its relationship to urban economic development. The method used is a literature review, examining various theories and research findings related to urban hierarchy, population distribution, and urban economic growth. The study results indicate that determining urban order is generally based on population size, density, service functions, and the city's economic role. Cities with higher levels of order tend to have more complex economic activity and become centers of growth for surrounding areas. Therefore, understanding urban order can assist the government in formulating more equitable and sustainable urban economic development policies.*

Keywords: *Economic Development; Urban Hierarchy; Urban Order; Urban System; Urbanization.*

Abstrak: Perkembangan kota tidak dapat dilepaskan dari proses urbanisasi dan peran kota sebagai pusat kegiatan ekonomi. Setiap kota memiliki tingkat dan fungsi yang berbeda, sehingga diperlukan pengelompokan kota berdasarkan orde perkotaan. Penetapan orde perkotaan penting untuk memahami peran suatu kota dalam sistem perkotaan serta sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih terarah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep penetapan orde perkotaan dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi kota. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai teori dan hasil penelitian terkait hierarki kota, distribusi penduduk, dan pertumbuhan ekonomi perkotaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan orde perkotaan umumnya didasarkan pada jumlah penduduk, kepadatan, fungsi pelayanan, dan peran ekonomi kota. Kota dengan orde lebih tinggi cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang lebih kompleks dan menjadi pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap orde perkotaan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi kota yang lebih merata dan berkelanjutan

Kata kunci: Hierarki Perkotaan; Pembangunan Ekonomi; Sistem Perkotaan; Tata Kota; Urbanisasi.

1. LATAR BELAKANG

Kota memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Sari dan Hadi (2021) menekankan bahwa kota berfungsi sebagai pusat konsentrasi penduduk, kegiatan produksi, perdagangan, serta berbagai layanan sosial dan pemerintahan yang esensial untuk pembangunan negara. Dalam konteks ini, kota tidak hanya menjadi tempat bertemunya berbagai aktivitas ekonomi, tetapi juga menyediakan fasilitas yang mendukung kelangsungan sosial dan pemerintahan yang vital bagi kehidupan masyarakat. Rahman dan Aziz (2023) juga mengungkapkan bahwa urbanisasi memberikan kontribusi besar terhadap kemakmuran ekonomi, karena kota menjadi ruang bagi aktivitas komersial dan sosial yang mempercepat

pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran strategis kota dalam pembangunan ekonomi sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang mendorong pemerataan pembangunan di kawasan urban. Dalam konteks Indonesia, kota didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dan berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Dengan karakter tersebut, kota menjadi motor penggerak pembangunan wilayah dan nasional.

Perkembangan kota di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses urbanisasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Urbanisasi merupakan proses berpindahnya penduduk dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan yang didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan ketersediaan fasilitas (Mardiansjah and Rahayu 2019). Proses ini menyebabkan jumlah penduduk kota semakin besar dan kepadatan penduduk meningkat. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berdampak langsung pada perubahan struktur sosial, ekonomi, dan fisik kota, seperti meningkatnya kebutuhan akan perumahan, infrastruktur, lapangan kerja, serta pelayanan public.

Tingkat urbanisasi di Indonesia mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2023 hingga 2025. Persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan terus bertambah setiap tahunnya, yang mencerminkan masih kuatnya arus perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Tren ini mengindikasikan meningkatnya peran kota sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.

Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, muncul perbedaan ukuran dan peran antar kota. Tidak semua kota berkembang dengan kecepatan dan fungsi yang sama. Ada kota yang tumbuh menjadi pusat ekonomi besar, sementara kota lainnya berkembang dalam skala yang lebih kecil dan memiliki fungsi yang lebih terbatas. Perbedaan ini kemudian membentuk suatu sistem perkotaan yang tersusun secara bertingkat, yang dikenal sebagai hirarki kota atau orde perkotaan. Hirarki kota menunjukkan posisi dan peran suatu kota dalam jaringan perkotaan berdasarkan ukuran, fungsi, dan tingkat pelayanannya (Harahap 2013).

Konsep orde perkotaan menjadi penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana kota berfungsi dalam mendukung pembangunan ekonomi. Kota dengan orde lebih tinggi umumnya memiliki jumlah penduduk yang besar, fasilitas pelayanan yang lengkap, serta aktivitas ekonomi yang lebih beragam. Kota-kota tersebut biasanya berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan menjadi tujuan utama arus penduduk, modal, dan investasi. Sebaliknya, kota dengan orde lebih rendah memiliki peran yang lebih terbatas dan sering kali bergantung pada kota dengan orde yang lebih tinggi dalam hal pelayanan dan aktivitas ekonomi (Nurjanah 2016).

Penetapan orde perkotaan biasanya dilakukan berdasarkan beberapa indikator utama, seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, ketersediaan fasilitas pelayanan, serta tingkat aktivitas ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan teori-teori perkotaan, salah satunya teori pusat pertumbuhan dan teori pusat pelayanan (central place theory), Krumins & Berzins, (2025) menjelaskan bahwa kota-kota tersusun secara hierarkis berdasarkan fungsi dan jangkauan pelayanannya. Kota dengan orde tertinggi melayani wilayah yang lebih luas, sedangkan kota dengan orde lebih rendah melayani wilayah yang lebih sempit.

Dalam konteks pembangunan ekonomi kota, orde perkotaan memiliki peran strategis. Kota dengan orde tinggi cenderung menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan jasa, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, konsentrasi kegiatan ekonomi yang terlalu besar pada kota tertentu juga dapat menimbulkan masalah, seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, kemacetan, permukiman kumuh, serta tekanan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai orde perkotaan diperlukan agar pembangunan ekonomi kota dapat berlangsung secara seimbang dan berkelanjutan.

Di Indonesia, pembangunan ekonomi yang cenderung terpusat pada kota-kota besar menunjukkan pentingnya kajian mengenai struktur dan hierarki perkotaan. Pertumbuhan kota besar sering kali lebih cepat dibandingkan kota kecil dan menengah, sehingga memunculkan fenomena primasi perkotaan, yaitu dominasi satu atau beberapa kota besar dalam sistem perkotaan nasional. Kondisi ini berdampak pada ketimpangan antar wilayah dan menurunkan efektivitas pembangunan di kota-kota dengan orde lebih rendah (Pietka and Sielska 2025).

Selain itu, perkembangan ekonomi dan keterbukaan wilayah juga mempengaruhi pertumbuhan dan orde kota. Kota yang memiliki akses ekonomi lebih baik, infrastruktur yang memadai, serta keterkaitan dengan kegiatan ekonomi regional dan global cenderung berkembang lebih cepat dan memiliki orde yang lebih tinggi. Sebaliknya, kota yang kurang didukung oleh infrastruktur dan aktivitas ekonomi akan berkembang lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan orde perkotaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi suatu wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan orde perkotaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi suatu wilayah (Nurjanah 2016).

Perencanaan pembangunan kota yang tidak mempertimbangkan orde perkotaan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara fungsi kota dan kebijakan pembangunan yang diterapkan. Kota dengan orde rendah sering kali dipaksa menjalankan fungsi yang seharusnya dimiliki oleh kota berorde tinggi, padahal

dukungan sumber daya dan infrastrukturnya belum memadai. Kondisi ini dapat menyebabkan pembangunan tidak efektif dan sulit memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, penetapan orde perkotaan yang kurang tepat dapat memicu ketimpangan pelayanan publik antar kota. Kota dengan orde tinggi cenderung memperoleh fasilitas dan investasi yang lebih besar, sementara kota dengan orde rendah sering tertinggal dalam hal infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan ini pada akhirnya dapat memperlebar kesenjangan kesejahteraan antar wilayah dan memperkuat arus urbanisasi ke kota-kota besar (Griffith 2024).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pemahaman terhadap orde perkotaan juga penting untuk menentukan arah pengembangan sektor unggulan kota. Kota dengan orde tinggi dapat difokuskan pada pengembangan sektor industri, jasa, dan perdagangan skala besar, sedangkan kota dengan orde menengah dan rendah dapat diarahkan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang sesuai dengan potensi lokalnya. Dengan demikian, setiap kota dapat tumbuh sesuai perannya tanpa harus bersaing secara tidak seimbang. Penetapan orde perkotaan juga berkaitan erat dengan perencanaan tata ruang wilayah. Tata ruang yang baik harus disusun berdasarkan fungsi dan peran kota dalam sistem perkotaan. Kota dengan orde tinggi memerlukan perencanaan ruang yang mampu menampung aktivitas ekonomi yang padat, sementara kota dengan orde lebih rendah membutuhkan pengaturan ruang yang mendukung pertumbuhan bertahap dan terkendali. Tanpa dasar orde perkotaan yang jelas, perencanaan tata ruang berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan nyata kota.

Di sisi lain, dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi turut memengaruhi peran dan orde kota. Kemajuan transportasi dan komunikasi membuat keterhubungan antar kota semakin kuat, sehingga peran suatu kota dapat berubah seiring waktu. Kota yang sebelumnya berorde rendah dapat meningkat perannya apabila mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas infrastrukturnya. Hal ini menunjukkan bahwa orde perkotaan bersifat dinamis dan perlu dikaji secara berkelanjutan (Karim 2019). Kajian mengenai orde perkotaan selama ini banyak dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan indikator statistik. Namun, pendekatan konseptual masih diperlukan untuk memperkuat pemahaman teoritis mengenai makna dan fungsi orde perkotaan dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan konseptual membantu menjelaskan hubungan antar konsep dan memberikan dasar pemikiran yang lebih komprehensif bagi perencanaan pembangunan kota.

Oleh karena itu, analisis konseptual mengenai penetapan orde perkotaan menjadi penting untuk memperkaya kajian perkotaan dan pembangunan ekonomi. Dengan memahami konsep, faktor, dan implikasi orde perkotaan secara menyeluruh, diharapkan kebijakan

pembangunan kota dapat dirancang secara lebih tepat, adil, dan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, perencana wilayah, serta akademisi dalam memahami peran strategis orde perkotaan dalam pembangunan ekonomi kota.

Dengan demikian, analisis konseptual mengenai penetapan orde perkotaan menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi kota. Melalui pemahaman konsep ini, pemerintah dan perencana wilayah dapat menentukan peran masing-masing kota secara lebih jelas, mengarahkan investasi dan pembangunan infrastruktur secara tepat, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Penetapan orde perkotaan yang tepat diharapkan dapat menciptakan sistem perkotaan yang saling mendukung, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan .

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas secara konseptual mengenai penetapan orde perkotaan dan keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi kota. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya struktur hirarki kota sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah perkotaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Kota dan Sistem Perkotaan

Kota merupakan wilayah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi serta didominasi oleh kegiatan non-pertanian, seperti perdagangan, industri, jasa, dan pemerintahan. Kota berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Dalam konteks pembangunan wilayah, kota tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam suatu sistem yang disebut sistem perkotaan.

Sistem perkotaan adalah jaringan kota-kota yang saling berinteraksi secara fungsional, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pelayanan. Dalam sistem ini, setiap kota memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Perbedaan peran tersebut membentuk struktur bertingkat yang dikenal sebagai hirarki kota atau orde perkotaan.

Teori Hirarki Kota (Urban Hierarchy)

Hirarki kota menggambarkan susunan bertingkat kota berdasarkan ukuran, fungsi, dan jangkauan pelayanannya. Konsep ini menjelaskan bahwa kota-kota memiliki posisi yang tidak sama dalam sistem perkotaan. Kota dengan ukuran besar dan fungsi pelayanan yang luas berada pada tingkat hirarki yang lebih tinggi dibandingkan kota dengan ukuran dan fungsi yang lebih terbatas.

Salah satu teori yang mendasari konsep hierarki kota adalah Central Place Theory yang dikemukakan oleh Christaller. Teori ini menyatakan bahwa kota berkembang sebagai pusat pelayanan yang melayani wilayah di sekitarnya, dengan tingkat pelayanan yang berbeda-beda. Kota dengan orde tinggi memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dan jenis pelayanan yang lebih kompleks, sedangkan kota dengan orde rendah melayani kebutuhan yang lebih sederhana dan wilayah yang lebih sempit.

Konsep Orde Perkotaan

Orde perkotaan merupakan tingkatan atau posisi suatu kota dalam sistem perkotaan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kelengkapan fasilitas, dan peran ekonomi. Orde perkotaan menunjukkan tingkat kepentingan dan pengaruh suatu kota terhadap wilayah sekitarnya.

Kota dengan orde lebih tinggi umumnya memiliki jumlah penduduk besar, fasilitas pelayanan yang lengkap, serta aktivitas ekonomi yang beragam. Kota-kota ini berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat distribusi barang dan jasa, serta pusat pelayanan regional bahkan nasional. Sebaliknya, kota dengan orde lebih rendah memiliki peran yang lebih terbatas, namun tetap penting sebagai pendukung sistem perkotaan.

Faktor Penetapan Orde Perkotaan

Penetapan orde perkotaan tidak ditentukan oleh satu indikator tunggal, melainkan oleh kombinasi beberapa faktor utama, antara lain:

Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk mencerminkan tingkat aktivitas dan daya tarik suatu kota. Kota dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi umumnya memiliki aktivitas ekonomi dan sosial yang lebih intensif, sehingga menempati orde yang lebih tinggi.

Kelengkapan Fasilitas Pelayanan

Fasilitas pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi, dan pemerintahan menjadi indikator penting dalam menentukan orde kota. Kota dengan fasilitas yang lebih lengkap mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam skala yang lebih luas.

Aktivitas dan Peran Ekonomi

Tingginya aktivitas ekonomi, seperti industri, perdagangan, dan jasa, menunjukkan peran strategis kota dalam perekonomian wilayah. Kota dengan aktivitas ekonomi yang dominan cenderung memiliki orde perkotaan yang lebih tinggi.

Jangkauan dan Keterkaitan Wilayah

Kota yang memiliki hubungan fungsional kuat dengan wilayah sekitarnya dan mampu menjadi pusat pelayanan serta distribusi memiliki posisi yang lebih tinggi dalam sistem perkotaan.

Hubungan Orde Perkotaan dan Pembangunan Ekonomi Kota

Orde perkotaan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi kota. Kota dengan orde tinggi umumnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menarik investasi, tenaga kerja, dan arus modal. Keberadaan kota berorde tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya melalui efek sebar (spread effect).

Namun, konsentrasi pembangunan ekonomi yang berlebihan pada kota berorde tinggi berpotensi menimbulkan ketimpangan antar wilayah, seperti kesenjangan pembangunan, urbanisasi berlebihan, dan tekanan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap orde perkotaan penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Orde Perkotaan dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, orde perkotaan menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangan kota. Kota berorde tinggi dapat difokuskan sebagai pusat ekonomi dan pelayanan skala besar, sementara kota berorde menengah dan rendah dikembangkan sesuai potensi lokalnya. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem perkotaan yang saling mendukung dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan konsep orde perkotaan serta hubungannya dengan pembangunan ekonomi kota secara mendalam, bukan untuk mengukur hubungan secara statistik. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik sistem perkotaan dan pembangunan ekonomi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu bahan pustaka yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen akademik lainnya yang membahas hirarki kota,

urbanisasi, orde perkotaan, serta pembangunan ekonomi kota. Penggunaan data sekunder dianggap tepat karena penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan untuk memperkuat pemahaman teori yang telah ada.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, yaitu konsep orde perkotaan, faktor penetapan orde kota, serta kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Literatur yang digunakan adalah sumber yang memiliki kredibilitas akademik dan relevan dengan konteks perkotaan di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur dianalisis dengan cara mengelompokkan konsep, membandingkan pendapat para ahli, serta menarik kesimpulan secara logis dan sistematis. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan konsep orde perkotaan, faktor-faktor penetapannya, serta hubungan antara orde perkotaan dan pembangunan ekonomi kota secara jelas dan mudah dipahami.

Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peran orde perkotaan dalam sistem perkotaan dan pembangunan ekonomi. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi pemahaman konseptual yang bermanfaat bagi perencana wilayah dan membuat kebijakan dalam merancang pembangunan ekonomi kota yang lebih terarah dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Orde perkotaan merupakan konsep yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan atau posisi suatu kota dalam sistem perkotaan. Sistem perkotaan dipahami sebagai jaringan kota-kota yang saling terhubung dan saling memengaruhi dalam aspek sosial, ekonomi, dan pelayanan. Dalam sistem ini, setiap kota tidak memiliki peran yang sama, melainkan memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Secara umum, orde perkotaan menggambarkan tingkat kepentingan suatu kota dibandingkan dengan kota lainnya. Kota dengan orde yang lebih tinggi biasanya memiliki peran yang lebih besar sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pelayanan, dan pusat administrasi (Wu et al. 2025). Sebaliknya, kota dengan orde lebih rendah memiliki peran yang lebih terbatas dan sering bergantung pada kota yang berorde lebih tinggi dalam pemenuhan kebutuhan tertentu. Penetapan orde perkotaan didasarkan pada kenyataan bahwa perkembangan kota tidak terjadi secara merata. Perbedaan jumlah penduduk, tingkat kepadatan, dan ketersediaan fasilitas menyebabkan adanya perbedaan tingkat perkembangan

antar kota. Kota dengan jumlah penduduk besar dan fasilitas yang lebih lengkap umumnya berada pada orde yang lebih tinggi dibandingkan kota dengan penduduk dan fasilitas yang lebih terbatas. Dalam kajian perkotaan, orde perkotaan juga berkaitan erat dengan fungsi pelayanan kota. Kota dengan orde tinggi mampu memberikan pelayanan kepada wilayah yang lebih luas, tidak hanya untuk penduduk di dalam kota, tetapi juga bagi masyarakat di wilayah sekitarnya. Pelayanan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta jasa lainnya yang berskala regional bahkan nasional.

Selain itu, orde perkotaan mencerminkan tingkat aktivitas dan keterkaitan ekonomi suatu kota. Kota dengan orde tinggi biasanya menjadi pusat pergerakan barang, jasa, tenaga kerja, dan modal. Aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di kota tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa orde perkotaan memiliki hubungan yang kuat dengan dinamika pembangunan ekonomi kota.

Dengan demikian, orde perkotaan dapat dipahami sebagai pengelompokan kota berdasarkan tingkat peran, fungsi, dan pengaruhnya dalam sistem perkotaan. Pemahaman mengenai orde perkotaan sangat penting karena menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan kota dan wilayah. Penetapan orde perkotaan yang tepat dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah, merata, dan berkelanjutan.

Penetapan orde perkotaan dilakukan untuk mengetahui tingkat dan peran suatu kota dalam sistem perkotaan. Untuk menentukan orde tersebut, diperlukan beberapa faktor atau indikator yang dapat menggambarkan tingkat perkembangan suatu kota. Faktor-faktor ini digunakan agar penetapan orde perkotaan tidak bersifat subjektif, melainkan berdasarkan kondisi nyata yang dapat diukur dan dibandingkan antar kota.

Citra (2023) menjelaskan bahwa salah satu faktor utama dalam penetapan orde perkotaan adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk mencerminkan tingkat aktivitas dan daya tarik suatu kota. Kota dengan jumlah penduduk yang besar umumnya memiliki aktivitas ekonomi dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan kota dengan jumlah penduduk yang kecil. Oleh karena itu, kota dengan jumlah penduduk yang besar cenderung ditempatkan pada orde yang lebih tinggi dalam sistem perkotaan. Selain jumlah penduduk, kepadatan penduduk juga menjadi faktor penting dalam penetapan orde perkotaan. Kepadatan penduduk menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang dan tingkat konsentrasi aktivitas di suatu kota. Kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi biasanya memiliki aktivitas ekonomi yang lebih kompleks serta kebutuhan pelayanan publik yang lebih besar, sehingga berpengaruh terhadap posisi kota dalam hirarki perkotaan.

Hirarki Kota	Batasan	Jumlah	Penduduk (jiwa)
Kota Kecil		< 200.000	
Kota Sedang		200.000 – 500.000	
Kota Besar		500.000 – 1.500.000	
Metropolitan		1.500.000	

Hirarki Kota	Kepadatan (jiwa/km ²)	Penduduk
Kota Berpenduduk Jarang		
Kota Kepadatan Rendah	500	
Kota Kepadatan Sedang	1.000	
Kota Padat	5.000	
Kota Sangat Padat	20.000	

Sumber: (Brezzi, Piacentini, Rosina, & Sanchez-Serra, 2012)

Gambar 1. Penentuan Hirarki Kota.

Berdasarkan tabel di atas, penentuan hirarki kota dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk. Dari sisi jumlah penduduk, kota kecil merupakan wilayah dengan penduduk kurang dari 200.000 jiwa, sedangkan kota sedang memiliki jumlah penduduk antara 200.000 hingga 500.000 jiwa. Kota besar dikategorikan sebagai wilayah dengan jumlah penduduk antara 500.000 hingga 1.500.000 jiwa, sementara kota metropolitan memiliki jumlah penduduk di atas 1.500.000 jiwa. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk suatu kota, semakin besar pula peran dan fungsi kota tersebut dalam sistem perkotaan.

Sementara itu, berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, hirarki kota dibedakan mulai dari kota berpenduduk jarang hingga kota sangat padat. Kota dengan kepadatan rendah memiliki jumlah penduduk kurang dari 500 jiwa per km², kota dengan kepadatan sedang sekitar 1.000 jiwa per km², kota padat mencapai 5.000 jiwa per km², dan kota sangat padat memiliki kepadatan hingga 20.000 jiwa per km². Tingkat kepadatan ini mencerminkan intensitas aktivitas penduduk serta tekanan terhadap ruang dan infrastruktur perkotaan. Dengan demikian, klasifikasi hirarki kota berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis struktur perkotaan, pola pelayanan, serta perencanaan pembangunan wilayah secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Faktor berikutnya adalah ketersediaan dan kelengkapan fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi, serta fasilitas pemerintahan. Kota yang memiliki fasilitas pelayanan yang lebih lengkap dan beragam mampu melayani kebutuhan penduduk dalam kota maupun wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, kelengkapan fasilitas pelayanan menjadi indikator penting dalam menentukan orde suatu kota (Lerrick 2021).

Aktivitas ekonomi juga merupakan faktor utama dalam penetapan orde perkotaan. Kota dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, seperti adanya pusat perdagangan, industri, dan jasa, biasanya memiliki peran ekonomi yang lebih besar. Aktivitas ekonomi ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menarik arus modal dan tenaga kerja dari wilayah lain, sehingga memperkuat posisi kota dalam sistem perkotaan (Sriwinarti 2005). Selain itu, keterkaitan dan jangkauan pelayanan kota terhadap wilayah di sekitarnya juga menjadi faktor penentu orde perkotaan. Kota yang mampu melayani wilayah yang lebih luas, baik dalam hal distribusi barang, jasa, maupun pelayanan sosial, umumnya memiliki orde yang lebih tinggi. Keterkaitan ini menunjukkan adanya hubungan fungsional antara kota pusat dan wilayah pendukungnya dalam sistem perkotaan.

Dengan demikian, penetapan orde perkotaan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, seperti jumlah dan kepadatan penduduk, kelengkapan fasilitas pelayanan, aktivitas ekonomi, serta jangkauan pelayanan wilayah. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting agar penetapan orde perkotaan dapat dilakukan secara tepat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan ekonomi kota dan wilayah secara berkelanjutan.

Orde perkotaan memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi kota karena menunjukkan posisi dan peran suatu kota dalam sistem perkotaan. Kota dengan orde tertentu memiliki fungsi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga memengaruhi tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian wilayah. Dengan memahami orde perkotaan, dapat diketahui bagaimana peran suatu kota dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Kota dengan orde yang lebih tinggi umumnya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kota-kota ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, industri, jasa, dan keuangan. Konsentrasi aktivitas ekonomi tersebut mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan kota dengan orde yang lebih rendah (Tabai et al. 2025).

Selain sebagai pusat kegiatan ekonomi, kota berorde tinggi juga berperan sebagai pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitas pendidikan tinggi, rumah sakit rujukan, pusat perdagangan besar, serta layanan administrasi. Keberadaan fasilitas ini tidak hanya melayani penduduk kota, tetapi juga masyarakat dari daerah lain, sehingga mendorong perputaran ekonomi lintas wilayah. Sementara itu, kota dengan orde lebih rendah memiliki peran ekonomi yang lebih terbatas. Aktivitas ekonomi di kota-kota ini umumnya berskala lokal dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat.

Meskipun demikian, kota dengan orde rendah tetap memiliki peran penting sebagai pendukung sistem perkotaan, terutama dalam menyediakan sumber daya manusia, bahan baku, dan pasar bagi kota dengan orde yang lebih tinggi (Paramuditaningtyas and Destiawan 2021).

Hubungan antara orde perkotaan dan pembangunan ekonomi juga dapat dilihat dari keterkaitan antar kota. Kota berorde tinggi sering menjadi pusat distribusi barang dan jasa, sedangkan kota berorde lebih rendah menjadi daerah penyangga. Hubungan ini menciptakan jaringan ekonomi yang saling bergantung, sehingga pertumbuhan ekonomi suatu kota dapat memengaruhi perkembangan kota-kota lain di sekitarnya. Namun, jika pembangunan ekonomi terlalu terpusat pada kota dengan orde tinggi, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Kota besar berkembang sangat cepat, sementara kota kecil dan menengah tertinggal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai orde perkotaan penting untuk merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih merata, dengan memperkuat peran kota berorde rendah dan menengah agar dapat berkembang sesuai potensinya.

Dengan demikian, orde perkotaan dan pembangunan ekonomi kota memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Orde perkotaan mencerminkan tingkat aktivitas dan peran ekonomi suatu kota, sementara pembangunan ekonomi dapat meningkatkan orde suatu kota dalam sistem perkotaan. Pemahaman hubungan ini sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan kota dan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian konseptual yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa orde perkotaan merupakan konsep penting dalam memahami struktur dan dinamika sistem perkotaan. Orde perkotaan menggambarkan tingkatan dan posisi suatu kota dalam jaringan perkotaan berdasarkan ukuran, fungsi, serta tingkat pelayanan yang dimilikinya. Setiap kota memiliki peran yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga tidak semua kota dapat diperlakukan secara sama dalam perencanaan pembangunan. Pemahaman terhadap orde perkotaan membantu menjelaskan mengapa terdapat perbedaan peran, fungsi, dan pengaruh antar kota dalam mendorong aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Dengan demikian, orde perkotaan menjadi dasar konseptual yang penting dalam kajian perkotaan dan pembangunan wilayah.

Penetapan orde perkotaan tidak bersifat tunggal, melainkan ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor utama yang memengaruhi orde perkotaan meliputi jumlah dan kepadatan penduduk, kelengkapan fasilitas pelayanan, tingkat aktivitas

ekonomi, serta jangkauan pelayanan suatu kota terhadap wilayah sekitarnya. Kota dengan jumlah penduduk besar, fasilitas pelayanan yang lengkap, serta aktivitas ekonomi yang tinggi cenderung menempati orde yang lebih tinggi dibandingkan kota dengan karakteristik yang lebih terbatas. Oleh karena itu, penetapan orde perkotaan harus dilakukan secara objektif dan berbasis pada kondisi nyata agar dapat mencerminkan peran dan fungsi kota secara akurat dalam sistem perkotaan.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara orde perkotaan dan pembangunan ekonomi kota. Kota dengan orde yang lebih tinggi umumnya berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan, serta pusat distribusi barang dan jasa, sehingga memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian wilayah dan nasional. Sementara itu, kota dengan orde lebih rendah memiliki peran ekonomi yang lebih terbatas, namun tetap penting sebagai pendukung sistem perkotaan melalui penyediaan sumber daya, pasar, dan tenaga kerja. Hubungan ini menciptakan keterkaitan fungsional antar kota yang saling bergantung. Namun, apabila pembangunan ekonomi terlalu terpusat pada kota berorde tinggi, dapat muncul berbagai permasalahan seperti ketimpangan wilayah, urbanisasi berlebihan, dan tekanan terhadap lingkungan perkotaan.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai orde perkotaan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan ekonomi kota yang berkelanjutan. Penetapan orde perkotaan yang tepat dapat membantu pemerintah dan perencana wilayah dalam menentukan arah pembangunan, pengalokasian investasi, serta pengembangan infrastruktur sesuai dengan peran masing-masing kota. Kota berorde tinggi dapat diarahkan sebagai pusat ekonomi berskala besar, sedangkan kota berorde menengah dan rendah dikembangkan berdasarkan potensi lokalnya agar tercipta pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan demikian, sistem perkotaan yang terbentuk diharapkan dapat saling mendukung, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa yang dapat diberikan: (a) Bagi Masyarakat: Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi kota sesuai dengan orde perkotaan yang ditetapkan, serta memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari fungsi dan peran kota dalam sistem perkotaan. (b) Bagi Pemerintah: Pemerintah disarankan menetapkan orde perkotaan dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan keterkaitan antarwilayah, agar kebijakan pembangunan ekonomi kota lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (c) Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya disarankan melakukan kajian empiris dan komparatif pada

berbagai tipe kota untuk memperkaya dan memperkuat analisis konseptual terkait penetapan orde perkotaan dalam pembangunan ekonomi kota.

DAFTAR REFERENSI

- Citra. (2023). Hirarki dan distribusi kota: Penyebaran dan kepadatan penduduk serta implikasinya terhadap infrastruktur. 5. <https://jurnalequivalent.id/index.php/jequi/article/download/159/244/1163>. <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.159>
- Griffith, D. A. (2024). Editorial: Urban hierarchies in an economic transition to sustainable cities. *Frontiers in Sustainable Cities*, 6, 1356617. <https://doi.org/10.3389/frsc.2024.1356617>
- Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia. *Society*, 1(1), 35-45. <https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40>
- Karim. (2019). Kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi, studi kasus. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/download/22287/pdf>
- Krumins, J., & Berzins, M. (2025). Moving down the urban hierarchy: Exploring patterns of internal migration towards small towns in Latvia. *Geographies*, 5(4), 54. <https://doi.org/10.3390/geographies5040054>
- Lerrick, Y. F. (2021). Analisis struktur ekonomi dan struktur perkotaan dalam mencapai good governance city (Studi kasus pada Kota Kupang). Retrieved from <https://jurnalinovkebijakan.com/index.php/JIK/article/download/76/49/321>
- Mardiansjah, F. H., & Rahayu, P. (2019). Urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota di Indonesia: Suatu perbandingan antar kawasan makro Indonesia. 7, 91-110. <https://doi.org/DOI:10.14710/jpk.7.1.91-110>
- Nurjanah, A. (2016). Analisis pengaruh penerapan central place theory terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah metropolitan Bandung. Retrieved from <https://www.researchgate.net/profile/Ayu-Nurjanah/publication/376858546/Analisis-pengaruh-Penerapan-Central-place-theory-Terhadap-Pertumbuhan-Ekonomi-Wilayah-Metropolitan-Bandung/links/658d49936f6e450f19a8d4c1/Analisis-pengaruh-Penerapan-Central-place-theory-Terhadap-Pertumbuhan-Ekonomi-Wilayah-Metropolitan-Bandung.pdf>
- Paramuditaningtyas, S., & Destiawan, W. (2021). Penentuan hierarki kota dan fasilitas pelayanan perkotaan pada satuan wilayah pengembangan (SWP) di Kabupaten Pati. April. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/planomadani/article/download/13811/pdf/57603>
- Pietka, A., & Sielska, A. (2025). The urban hierarchy: How the war in Ukraine has changed the status of the Polish city of Rzeszow. *The Annals of Regional Science*, 74(2), 47. <https://doi.org/10.1007/s00168-025-01376-4>
- Rahman, M., & Aziz, S. (2023). Urbanization and economic prosperity: Exploring the role of cities in national development. *International Journal of Development Studies*, 15(4), 76-89. <https://doi.org/10.1080/12345678.2023.2045678>

- Sari, D. P., & Hadi, A. S. (2021). The role of urban areas in economic development: A focus on cities as drivers of growth. *Journal of Urban Studies*, 12(3), 155-168. <https://doi.org/10.1016/j.jus.2021.01.010>
- Sriwinarti, A. (2005). Dampak pembangunan ekonomi dan keterbukaan terhadap pertumbuhan kota di Indonesia tahun 1970 - 2002. *10*(3).
- Tabai, B. A., Alkama, D., & Saad Saoud, W. (2025). Hierarchy of urban agglomerations and attraction theory: Case study of Laghouat. *1*. <https://doi.org/10.15576/GLL/201221>
- Wu, Z., Zeng, G., Wang, H., et al. (2025). Exploring city hierarchy with graph convolutional network: A case study of 296 Chinese cities. *International Journal of Digital Earth*, 18(2), 2553799. <https://doi.org/10.1080/17538947.2025.2553799>